

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN DKI JAKARTA
KPKNL JAKARTA I



LAPORAN KEUANGAN

AUDITED TA 2025



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2026
Plt. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Laila Chairani

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	18
C. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	22
D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	29
E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	34
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	37
Lampiran	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I**

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NO.10 JAKARTA PUSAT 10410 TELEPON:
(021) 34835237; FAKSIMILE: (021) 34835131; SITUS: www.djkn.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2026

Plt. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Laila Chairani

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KPKNL Jakarta I Semester I TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 24.905.782.533 atau mencapai 89.53 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp27.818.955.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.079.641.306 atau mencapai 89.53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.506.700.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.475.581.670 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp656.374.461; Aset Tetap (netto) sebesar Rp819.207.209; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp471.418.303 dan Rp1.004.163.367.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban operasional, surplus/ defisit dari kegiatan operasional, surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.796.198.533, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp2.477.003.904 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp22.319.194.629. Kegiatan Non Operasional surplus sebesar 0 dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp93.939.065 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp22.413.133.694.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp1.309.813.392 ditambah Surplus-LO sebesar Rp22.413.133.694, Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar sebesar Rp0, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp7 22.718.783.719) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.004.163.367.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2025 menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK TA 2025 adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2025		% REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
1		2	4	6	8
A. Pendapatan Negara	B.1	0,	0,	0	0,
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	27.818.955.000,	24.905.782.533,	89,53	26.031.398.655,
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		27.818.955.000,	24.905.782.533,	89,53	26.031.398.655,
B. Belanja Negara	B.2	0,	0,	0	0,
I. Belanja Pemerintah Pusat		2.506.700.000,	2.079.641.306,	82,96	2.215.559.127,
1. Belanja Pegawai	B.2.1	0,	0,	0	0,
2. Belanja Barang	B.2.2	2.428.106.000,	2.040.451.306,	84,03	1.851.871.192,
3. Belanja Modal	B.2.3	78.594.000,	39.190.000,	49,86	363.687.935,
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		2.506.700.000,	2.079.641.306,	82,96	2.215.559.127,

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Uraian		2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	470.683.303,	1.533.686.615
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2	35.202.931,	50.847.866
Persediaan	C.3	150.488.227,	235.612.278
JUMLAH ASET LANCAR		656.374.461,	1.820.146.759
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	4.766.526.992,	5.101.874.487
Aset Tetap Lainnya	C.5	12.999.715,	12.999.715
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.6	(3.960.319.498,)	(4.091.329.146)
JUMLAH ASET TETAP		819.207.209,	1.023.545.056
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.7	785.316.408,	630.613.523
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.8	(785.316.408,)	(630.613.523)
JUMLAH ASET LAINNYA		0,	0
JUMLAH ASET		1.475.581.670,	2.843.691.815
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.9	471.418.303,	1.533.878.423
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		471.418.303,	1.533.878.423
JUMLAH KEWAJIBAN		471.418.303,	1.533.878.423
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.10	1.004.163.367,	1.309.813.392
JUMLAH EKUITAS		1.004.163.367,	1.309.813.392
JUMLAH EKUITAS		1.004.163.367,	1.309.813.392
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.475.581.670	2.843.691.815

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catt	TA 2025	TA 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	24.796.198.533,	26.082.246.521,
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		24.796.198.533,	26.082.246.521,
Jumlah Pendapatan		24.796.198.533,	26.082.246.521,
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	0,	0,
Beban Persediaan	D.3	296.922.951,	191.935.496,
Beban Barang dan Jasa	D.4	946.229.651,	783.982.218,
Beban Pemeliharaan	D.5	223.733.490,	212.608.504,
Beban Perjalanan Dinas	D.6	659.424.265,	644.168.933,
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	D.7	0,	0,
Beban Bantuan Sosial	D.8	0,	0,
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	350.693.547,	352.302.350,
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0,	0,
Beban Lain-Lain	D.11	0,	0,
JUMLAH BEBAN		2.477.003.904,	2.184.997.501,
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		22.319.194.629,	23.897.249.020,
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.12	93.674.000,	0,
Pendapatan Pelepasan Aset	D.13	93.674.000,	0,
Beban Pelepasan Aset	D.14	0,	0,
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.15	0,	0,
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	265.065,	0,
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.17	265.065,	0,
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.18	0,	0,
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		93.939.065,	0,
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		22.413.133.694,	23.897.249.020,
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.16	0,	0,
POS LUAR BIASA		0,	0,
SURPLUS/DEFISIT - LO		22.413.133.694,	23.897.249.020,

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catt	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	1.309.813.392,	785.726.400,
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	22.413.133.694,	23.897.249.020,
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0,	0,
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0,	0,
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.2	0,	0,
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(22.718.783.719,)	(23.373.162.028,)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(305.650.025,)	524.086.992,
EKUITAS AKHIR	E.5	1.004.163.367,	1.309.813.392,

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Jakarta I

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I merupakan salah satu unit vertikal DJKN yang berada di bawah Kanwil DJKN DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Melalui peran tersebut diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I berkomitmen dengan visi DJKN ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan adalah berdasarkan SE-17/MK.1/2015 (15 Jenis Penerimaan), sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas lelang non

eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423292);

- 2) Penerimaan atas Kertas Sekuriti Untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423292);
- 3) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Pegadaian (setoran SSBP menggunakan MAP 423293);
- 4) Penerimaan atas Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423999);
- 5) Penerimaan Pemberian Izin Operasional Balai Lelang (setoran SSBP menggunakan MAP 423999);
- 6) Penerimaan atas Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423999);
- 7) Penerimaan Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang Ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423292);
- 8) Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual (setoran SSBP menggunakan MAP 423227);
- 9) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli (setoran SSBP menggunakan MAP 423227) atas lelang eksekusi, non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, dan lelang kayu hasil hutan lainnya dari tangan pertama;
- 10) Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 423228);
- 11) Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAP 423291);
- 12) Penerimaan atas Uang Jaminan Penawaran Lelang Yang Tidak Diambil (setoran SSBP menggunakan MAP 423291);
- 13) Penerimaan Kelebihan Hasil Bersih Lelang PUPN yang Tidak Diambil oleh Penanggung Hutang dan/ atau Penjamin Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 423998);

- 14) Penerimaan Pemohon Lelang Tidak Bersedia Mengambil/
Mencairkan Cek/BG Menerima Hasil Bersih Lelang (setoran SSBP
menggunakan MAP 423998);
- 15) Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara Yang Tidak Jelas
(setoran SSBP menggunakan MAP 423999)

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan

kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	

Macet	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%
-------	--	------

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**Piutang
Jangka
Panjang**

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
--	----

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	SEMESTER I 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	27.818.955.000,00	24,905,782,533,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Estimasi Pendapatan	27.818.955.000,00	24,905,782,533,00
Belanja		
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang	2,428,106,000,00	2,040,451,306,00
Belanja Modal	78,594,000,00	39,190,000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Jumlah Anggaran Belanja	2,506,700,000,00	2,079,641,306,00

Realisasi
Pendapatan
Rp24.905.782.533

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.905.782.533 atau mencapai 89.53 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp27.818.955.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I terdiri dari Pendapatan Jasa II (Pendapatan Bea Lelang dan Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara) dan Pendapatan Jasa Lainnya (Pendapatan Jasa Lainnya dan Pendapatan Bea Lelang Pegadaian). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	SEMESTER I 2025		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
Penjualan Pemanfaatan BMN	-	-	-
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	-	93.674.000,00	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang I	22.686.482.000,00	18.698.769.022,00	82,42
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3.150.901.000,00	2.538.610.308,00	80,,57
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1.981.572.000,00	3.560.971.101,00	179,7
Jumlah Pendapatan Jasa II	27.818.955.000,00	24.798.350.431,00	89,14
Pendapatan Jasa Lainnya	-	1.000.000,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	265.065,00	
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	15.553.037,00	
Jumlah Pendapatan Jasa Lainnya	-	1.000.000,00	-
		15.818.102,,00	
Jumlah	27.818.955.000,00	24.908.842.533,,00	89,53

Realisasi Belanja
Negara
Rp2.079.641.306

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.079.641.306 atau 82,96% dari anggaran belanja sebesar Rp2.506.700.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	2025				
	Anggaran	Realisasi Brutto	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto	% Real Angg.
Rupiah Murni					
Belanja Barang	2.381.668.000,	2.009.881.263,	-	2.009.881.263,	84,39
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
Belanja Modal	78.594.000,	39.190.000,	-	39.190.000	49,86
PNBP					
Belanja Bahan	4.476.000	1.500.000	-	1.500.000	33,51
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.657.000	21.650.043	-	21.650.043	75,55
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.305.000	7.420.000	-	7.420.000	55,77
Jumlah (Netto)	2.506.700.000,	2.079.641.306,	-	2.079.641.306,	82,96

Belanja Pegawai
Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp.0. Realisasi belanja Semester I TA 2025 terhadap anggaran sebesar 0 persen. Hal ini disebabkan antara lain karena belanja Pegawai sekarang terpusat pada kantor pusat penyerapan anggaran TA 2025 pada Belanja Uang Lembur.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

URAIAN	ANGGARAN BELANJA TA 2025	REALISASI BELANJA TA 2024	REALISASI ANGGARAN %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0,00	0,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0,00	0,00	-
Belanja Honorarium	0,00	0,00	-
Belanja Lembur	0,00	0,00	-
Belanja Vakasi	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja Netto	0,00	0,00	-
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja	0,00	0,00	-

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp
2.040.451.306

Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp2.040.451.306. Realisasi Belanja Barang TA 2025 terhadap anggaran sebesar 84,03 persen. Hal ini disebabkan antara lain karena kurang maksimalnya penyerapan anggaran

TA 2025 pada Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa, dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri.

Realisasi Belanja Barang TA 2025

URAIAN	ANGGARAN BELANJA TA 2025	REALISASI BELANJA TA 2025	REALISASI ANGGARAN %
Belanja Barang Operasional	910.440.000,	883.472.650	97,04
Belanja Barang Non Operasional	114.849.000,	62.022.001	54
Belanja Barang Persediaan	301.796.000,	211.798.900	70,18
Belanja Jasa		-	-
Belanja Pemeliharaan	289.938.000,	223.733.490	77,17
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	811.083.000	659.424.265	81,3
Jumlah Belanja Netto	2.428.106.000	2.040.451.306	84,03
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja	2.428.106.000,	2.040.451.306	84,03

*Belanja Modal
Rp39.190.000*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 adalah sebesar Rp39.190.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi belanja modal dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Modal Semester I 2025

URAIAN	ANGGARAN BELANJA T.A. 2025	REALISASI BELANJA T.A. 2025	REALISASI ANGGARAN %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.594.000	39.190.000	49.86
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	
Jumlah Belanja Kotor	78.594.000	39.190.000	49.86
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	78.594.000	39.190.000	49,86

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 terhadap Anggaran TA 2025 adalah sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA T.A. 2022	REALISASI BELANJA T.A. 2025	REALISASI ANGGARAN %
Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0.00	0.00	0.00
Tanah	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0.00	0.00	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp39.190.000 atau sebesar 49.86% dari anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

URAIAN	ANGGARAN BELANJA T.A. 2025	REALISASI BELANJA T.A. 2025	REALISASI ANGGARAN %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.594.000,	39.190.000,00	
Jumlah Belanja Kotor	78.594.000,	39.190.000,00	49.86
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	78.594.000,	39.190.000,00	49.86

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 adalah sebesar Rp0 atau sebesar 0% dari anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA T.A. 2025	REALISASI BELANJA T.A. 2025	REALISASI ANGGARAN %
Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 adalah sebesar Rp0 atau sebesar 0% dari anggaran belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA SMT I T.A. 2025	REALISASI BELANJA SMT I T.A. 2025	REALISASI ANGGARA N %
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp0 atau sebesar 0% dari anggaran belanja modal Lainnya.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Modal Bantuan Sosial TA 2025 adalah sebesar Rp0 atau sebesar 0% dari anggaran belanja modal Bantuan Sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Semester I 2025

URAIAN	ANGGARAN BELANJA SMT I T.A. 2025	REALISASI BELANJA SMT I T.A. 2025	REALISASI ANGGARAN %
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp36.000.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp36.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TAHUNAN 2025	TAHUNAN 2024
Saldo UP	36.000.000,00	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	36.000.000,00	-

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara).

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TAHUNAN 2025	TAHUNAN 2024
Biaya Administrasi	-	-
Bea Lelang	-	-
Jasa Giro Setelah Dikurangi Pajak (sebelum TNP)	-	-
Hasil Bersih Lelang BMN milik KPKNL	-	-
Lain-lain (Wanprestasi)	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp470.683.303

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp470.683.303 dan Rp1.533.686.615,00 Kas Lainnya dan setara kas terdiri dari:

1) Kas lainnya Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0

2) Kas lainnya Bendahara Penerimaan sebesar Rp470.683.303

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TA 2025	TA 2024
Utang Bendahara Pengeluaran kepada Pihak Ketiga lainnya	-	
Utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	-	
Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang belum disetor	-	
Dana milik BUMN/Swasta/Pihak Ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer kepada Pihak yang Berhak	470.683.303	1.533.686.615,00
Dana yang masih dalam proses identifikasi dan Konfirmas	-	
Dana yang berasal dari setoran dan kredit nota tidak jelas	-	
Jumlah	470.683.303,00	1.533.686.615,00

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNPB per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Bagian Lancar TPA
Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Belanja Dibayar di Muka
Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Persediaan
Rp150.488.227

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp150.488.227 dan Rp235.612.278.

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	SMT I 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	150.488.227,00	235.612.278,00
Bahan Baku	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	150.488.227,00	235.612.278,00

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih –Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tanah Rp0

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp4,766,526,992

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp4,766,526,992 dan Rp5.101.874.487.

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025		5.101.874.487
Mutasi tambah:		
Pembelian		153.507.850
Reklasifikasi Masuk		0
Transfer Masuk Mutasi		
kurang:		
Transfer Keluar		-
Reklasifikasi Keluar		-
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi		-
Penghapusan		-
Saldo per 31 Desember 2025		5.255.382.337
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		-488.855.345
Nilai Buku per 30 Juni 2025		4,766,526,992

*Gedung dan Bangunan
Rp0*

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah

Rp0 dan Rp0.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0*

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Aset Tetap Lainnya
Rp12.999.715,00*

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp12.999.715,00 dan Rp12.999.715,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa barang monografi. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp 0*

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(4.271.589.483)*

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp(4.271.589.483) dan Rp(4.271.589.483). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.766.526.992	-3.960.319.498	806.207.494
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	12.999.715	0	12.999.715
Jumlah		4.779.526.707	-3.960.319.498	819.207.209

Aset Tak Berwujud Rp0

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp785.316.408*

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada KPKNL Jakarta I adalah Rp785.316.408 dan Rp630.613.523. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp785.316.408*

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp785.316.408 dan Rp630.613.523. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari KPPN
Rp36.000.000*

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp36.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp471.418.303*

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.463.766.938. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	0	Tunjangan Kinerja pegawai bulan ke 13 yang baru akan dibayarkan pada 1 Juli 2025
Belanja Barang yang masih harus dibayar	471.418.303	Utang kepada pihak ketiga yang masih belum dibayarkan
Kas lainnya di Bendahara Penerimaan	0	Dana milik pihak ketiga lainnya yang belum ditransfer ke pihak yang berhak serta dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi
Total	471.418.303	

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Ekuitas Rp1.004.163.367

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.004.163.367 dan Rp1.309.813.392 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp24.905.782.533

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 1 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.905.782.533 dan Rp26.031.398.655. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	93.674.000,00	133.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	1.000.000,00	500.232,00
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	18.698.769.022,00	15.174.175.380 00
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.538.610.308,00	2.662.554.142,00
Pendapatan Bea Lelang Administrasi Pengurusan Piutang Negara	3.560.971.101,00	8.192.035.900,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	265.065,00	-
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	12.553.037,00	2.000.001,00
Jumlah	24.905.782.533,00	26.031.398.655,00

Pendapatan Jasa Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari uang jaminan lelang yang telah disetor ke rekening Bendahara Penerima, namun pada waktu yang telah ditentukan pemenang lelang tidak melunasi sehingga dinyatakan wanprestasi.

Beban Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024

Uraian Jenis Beban	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Anak PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunjangan PPH PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Beras PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PNS	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Uang Honor Tetap	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Persediaan
Rp296.922.951*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp296.922.951 dan Rp191.935.496. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	296.922.951,00	191.935.496,00	-
Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	62.179.049,00	77.747.269,00	-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp946.229.631 dan Rp783.982.218. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024
Beban Keperluan Perkantoran	668.555.935,	513.989.370,
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	31.160.800,	29.894.180,
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23.917.415,	26.189.771,
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	107.640.000,	90.984.000,
Beban Barang Operasional Lainnya	52.933.500,	42.750.000,
Beban Bahan	22.952.000,	25.419.500,
Beban Barang Non Operasional Lainnya	39.070.001,	36.251.207,
Jumlah	946.229.631,00	783.982.218,00

Beban
Pemeliharaan
Rp212.608.504,

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp212.608.504, dan Rp86.423.747. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester I 2025 dan Semester I 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I 2025 dan Semester I 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	212.608.504,	191.935.496,
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0
Jumlah	212.608.504,	191.935.496,

Beban Perjalanan
Dinas
Rp659.424.265

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp659.424.265 dan Rp644.168.933. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024

Uraian	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	451.774.265	392.956.933,
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	207.650.000	251.212.000,
JUMLAH	659.424.265	644.168.933,

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp350.693.547*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I 2025 dan Semester I 2024 masing-masing sebesar Rp350.693.547, dan Rp352.302.350. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I 2025 dan Semester I 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan TA 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	350.693.547,00	352.302.350,00	0,19
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	-	-	-
Jumlah Penyusutan	350.693.547,00	352.302.350,00	0,19
			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Amortisasi	350.693.547,00	352.302.350,00	0,19

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Lain-lain
Rp0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Semester I 2025 dan Semester I 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/- Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Terdiri dari surplus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0 dan surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0 dan beban dari kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp0 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2025 sebesar Rp0.

Pos Luar Biasa Rp0

D.13. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa pada Semester I TA 2025 sebesar Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp1.309.813.392

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.309.813.392 dan Rp785.726.400.

Surplus LO

Rp22.413.133.694

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.413.133.694 dan Rp23.897.249.020. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/ defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak

Kumulatif

Perubahan

Kebijakan Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.4.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi Antar
Entitas
(Rp22.718.783.719)

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp22.718.783.719) dan (Rp23.373.162.028).

Ekuitas Akhir
Rp1.004.163.367

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.004.163.367 dan Rp1.309.813.392

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- 1). Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Daftar informasi rekening pemerintah disajikan sebagaimana dalam lampiran.

Adanya mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyebabkan perubahan pada posisi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen.

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Rofii Edy Purnomo
Pejabat Pembuat Komitmen	: Linda Susanti
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Yanuardhi Setyo Rachman
Bendahara	: Adhitya Aji Prasetyo

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Laila Chairani
Pejabat Pembuat Komitmen	: Linda Susanti
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Yanuardhi Setyo Rachman
Bendahara	: Aisya Nur Alin